

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN
KINERJA LAYANAN INFORMASI DI DINAS KOMINFOTIK
KABUPATEN BIMA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



OLEH:

TULFAH MUWADAH
NIM : 2020B1D063

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2024

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN
KINERJA LAYANAN INFORMASI DI DINAS KOMINFOTIK
KABUPATEN BIMA**

Oleh:

Tulfah Muwadah¹

tulfahmuwadah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan layanan informasi di kabupaten bima. Namun, masih terdapat beberapa masalah terkait keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bima. permasalahan yaitu kurangnya kesiapan badan publik dalam memberikan informasi atau data-data yang diminta oleh beberapa masyarakat atau mahasiswa yang membutuhkan data tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dokumentasi dan observasi, dengan subyek penelitian dari pihak, kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bima, media, dan masyarakat. Validasi data ini menggunakan triangulasi. Analisis data menggunakan reduksi, display, verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan keterbukaan informasi publik pada Dinas Kominfo Kabupaten Bima tergolong baik, karna jumlah pemohon informasi publik pada tahun 2021 pelayanan informasi publik Dinas Kominfo Kabupaten Bima berjalan dengan normal atau tidak ada yang berujung pada terjadinya sengketa informasi, pemohon informasi merasa puas itu berarti Dinas Kominfo Kabupaten Bima telah merespon dengan baik apa yang menjadi keluhan masyarakat, dengan pelayanan yang mereka terima, dan memahami alasan dinas kominfo kabupaten bima dalam mengkategorisasikan informasi sehingga adanya informasi yang dikecualikan ataupun yang tidak dikuasai.

Kata kunci: keterbukaan, informasi publik, kinerja

**PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE IN IMPROVING THE
PERFORMANCE OF INFORMATION SERVICES AT THE KOMINFOTIK
OFFICE
BIMA DISTRICT**

By:
Tulfah Muwadah¹
tulfahmuwadah@gmail.com

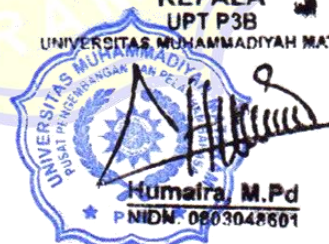
ABSTRACT

This research is motivated by the problem of public information disclosure in improving information services in Bima Regency. In Bima Regency, however, there are still some issues regarding the disclosure of public information. The issue lies in the inability of public agencies to readily provide the information or data that certain individuals or students require. A qualitative research method with a descriptive approach is employed in this study. Interviews, documentation, and observation were used to gather data from the director of the Bima District Kominfotik office, the media, and the community of research subjects. This validation of data employs triangulation. The stages of data analysis include reduction, display, verification, and conclusion. The results showed that the performance of public information disclosure services at the Bima Regency Information and Communication Service was classified as good because the number of public information applicants in 2021 the public information service of the Bima Regency Information and Communication Service was running normally or nothing to information disputes, the information applicant was satisfied, it meant that the Bima Regency Information and Communication Service had responded well to what was a public complaint, with the services they received, and understood the reasons for the Bima Regency Information and Communication Service in categorizing information so that there was exempt or non-controlled information.

Keywords: openness, public information, performance

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
WATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu prinsip kemerdekaan pilar demokrasi dan kebebasan berekspresi, keterbukaan dan *good governance*. Dalam undang-undang termasuk, hak publik untuk mengetahui informasi mendapatkan jaminan, dan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi bagian dari upaya untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat juga dapat memantau lajunya kinerja pemerintahan. akibatnya, setiap lembaga Badan Publik harus menyiapkan petugas bagi pelayanan masyarakat di bidang informasi. Petugas Komunikasi dan Informatika ini baik dalam tingkat nasional, provinsi ataupun daerah memiliki tugas pokok yang diatur oleh Undang-Undang No 14/2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik. Melalui undang-undang, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan KIP agar tujuan undang- undang tersebut dapat tercapai.(Indah & Hariyanti, n.d.)

Keterbukaan Informasi menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan Good Governance dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, kerja sama dan tanggung jawab. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya mandate UU Nomo 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik dianggap sebagai komponen penting dalam suatu Penyelenggaraan pelayanan publik yang bermakna tinggi dan berfungsi sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik

Salah satu hak asasi adalah hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi selain itu dengan keterbukaan informasi oleh karena itu masyarakat dapat turut mengontrol, mengawasi kinerja dan juga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan oleh lembaga badan Publik selain mendorong terwujudnya pelayanan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan negara dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang adalah upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pembentukan dan terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*). Keterbukaan informasi kepada masyarakat juga termasuk salah satu tanda bahwa negara itu demokratis bahwa masyarakat dapat melaksanakan mekanisme kontrol untuk menyikapi atau menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab negaranya. Mahfud (2000:20) menyatakan jika betapa pentingnya demokrasi mempunyai arti penting bagi seluruh masyarakat, karena demokrasi adalah hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan hidup organisasi suatu negara. (Nurdiansyah, n.d.2016)

Menurut Erlina Hasan (2010) berkembangnya semangat keterbukaan dalam masyarakat setidaknya dipandu oleh kecanggihan sistem komunikasi dan informasi dimana masyarakat dengan mudah mengakses berbagai permasalahan, khususnya bidang pemerintahan dari berbagai belahan dunia yang secara tidak langsung membuka mata dan telinga bagaimana negara lain mengelola dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya.

Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik (Azhar Sa'ban, 2022)

Dalam era berkembangnya teknologi informasi maka pemerintah juga dituntut untuk membuka seluas-luasnya informasi khususnya informasi yang bersifat umum dan mendasar. Bahkan salah satu indikator utama terciptanya *smart city* yang menjadi tujuan kota-kota di dunia saat ini adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan bersama-sama dengan pemerintah dalam menentukan keputusan yang lebih baik (*smart decision-making*). Informasi publik merupakan salah satu kajian dalam ilmu pemerintahan dan juga ilmu administrasi publik/negara. Pada ilmu pemerintahan sendiri, kajian terkait informasi publik ini masuk dalam kajian komunikasi pemerintahan yang dimana, negara melalui birokrat/pemerintahnya berbagi informasi, gagasan atau perasaan, dan sikap dengan partisipan komunikasi lainnya yang disebut komunikan, yaitu aparatur pemerintah untuk internal organisasi dan dunia usaha, masyarakat dan organisasi-organisasi non-pemerintah untuk eksternal organisasi, dan sebaliknya keterbukaan informasi publik bisa diartikan sebagai kesediaan badan publik negara atau badan publik non negara untuk memberikan berbagai

informasi akurat tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial, hukum dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan kepentingan umum (Mustofa, 2020). Dalam jumlah literatur telah disimpulkan bahwa dengan menerapkan keterbukaan informasi akan meningkatkan dan mendukung tingkat keberhasilan badan publik termasuk dalam hal ini pemerintah dan lembaga-lembaganya untuk lebih bisa memiliki kemampuan untuk memaksimalkan tujuannya. (Rahimallah et al., 2022)

Secara umum kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang karyawan dalam menyelesaikan tugas utama dan fungsinya sebagai karyawan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi (Mangkunegara, 2013).

Keterbukaan informasi publik adalah hak publik untuk mengumpulkan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam konteks Kabupaten Bima, keterbukaan informasi publik sangat penting sekali untuk memastikan kinerja pemerintah transparansi dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah, masih terdapat beberapa masalah terkait keterbukaan informasi publik di Dinas Kominfo Kabupaten Bima, permasalahannya yaitu kurangnya kesiapan badan publik dalam menyediakan data atau informasi yang diminta yang diminta oleh beberapa masyarakat atau mahasiswa yang membutuhkan data itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan tahap persiapan *e- government* di Kabupaten Bima sifatnya baru satu arah saja yakni hanya

memberikan informasi kepada *stakeholders* dan belum mencapai hubungan yang interaktif antara pemerintah sebagai pelayan dan masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Salah satu jenis layanan yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima adalah berupa situs website yang hanya menyampaikan informasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat atau perusahaan secara langsung. Dengan demikian, aplikasi pelayanan berbasis *egovernment* kepada masyarakat selama ini, masih terdapat banyak hal yang perlu dipersiapkan. (Nur & Usman, 2022)

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **“KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KINERJA LAYANAN INFORMASI DI DINAS KOMINFOTIK KAB. BIMA”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keterbukaan informasi publik terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bima
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bima

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya tujuan, penelitian yang akan dilakukan dapat memperlihatkan gambaran yang jelas terhadap arah serta target yang ingin dicapai. Begitupun penelitian ini yang memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui apakah keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan, dan mendorong partisipasi masyarakat publik demi Pembangunan, dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat kepada pemerintah.

2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi kendala dalam menjalankan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bima

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

secara teoritis penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana tingkat transparansi atau keterbukaan informasi publik di pemerintahan daerah khususnya di kabupaten bima. Serta dapat menjadi bahan kajian untuk peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

- b. Manfaat Praktis

1. Manfaat penelitian bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti dan dapat digunakan dilingkungan masyarakat juga untuk penelitian sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dan mampu menyusun karya ilmiah.

2. Manfaat penelitian bagi pemerintah

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah khususnya daerah kabupaten bima dan dapat dijadikan acuan dalam hal keterbukaan informasi publik terhadap transparansi kinerja yang ada di Kabupaten Bima

3. Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat, dimana dapat menjadikan acuan atau bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Keterbukaan Informasi Publik Dalam Meningkatkan Kinerja Layanan Informasi Di Dinas Kominfo Kabupaten Bima peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. kesadaran masyarakat akan keterbukaan informasi publik di kabupaten bima masih terbilang kurang karena masih banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan keterbukaan informasi publik, akan tetapi pemerintah dinas komunikasi informasi dan statistik (kominfo) kabupaten bima telah menyediakan platform smart city dan command center agar memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi.
2. badan publik pemerintah dinas komunikasi informasi dan statistik (kominfo) kabupaten bima aktif dan responsif dalam memberikan layanan informasi publik terbukti pemerintah telah meluncurkan sistem informasi bima satu data (SABISA) yang dimana bertujuan untuk memastikan data yang akurat, mutakhir, mudah diakses oleh masyarakat.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis tuangkan pada penelitian ini yaitu:

1. perlu dilakukan pembenahan terhadap fasilitas di kantor dinas komunikasi informasi dan statistik kabupaten bima
2. perlu mengadakan pelatihan manajemen pegawai di kantor dinas komunikasi informasi dan statistika kabupaten bima